

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kesebelas, Edisi Revisi IV, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 1998.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Edisi I, Cetakan VI, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Keduapuluh satu, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Fajar ND., Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah (Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama) Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Edisi 17, Yogyakarta, Andi Offset, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta, LIBERTY, 1996.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2008.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Edisi Pertama, Bandung, JEMMARS, 1982.
- Pahala Siahaan, Marihot, *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, GRAHA ILMU, 2015.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Andi, 2022.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Jakarta, RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005.

- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana, 2010.
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, AMUS, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan Kedua, Eresco, Bandung, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Cetakan Ketiga, Bandung, Eresco, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Eresco, 1991.
- Soemitro, Rochmat dan Kania Sugiharti, Dewi, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya, Arkola Offset, 2003.
- Sri Wibawanti, Erna dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 2013.
- Sumardjono, Maria SW., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi, 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Penelitian Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Edisi ketujuh, Bandung, TARSITO, 1990.

Yamin Lubis, Muhammad, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 2008.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cetakan 43, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736) perubahan dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757) .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Lembaran Lepas Sekretariat Kabupaten Nomor 36).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Nomor 159)

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, Nomor 49)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

### **Skripsi, Tesis, Desertasi**

Handika, Irine, “Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”, Desertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Sugiharto ,Bambang, “Realisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Gunawan, Ayep Wahyu, “Penegakan Hukum (Law Enforcement) Pajak Bumi dan Bangunan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Malang Jawa Timur”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Alfriadi, “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual-Beli di Kota Bandar Lampung”, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

### Jurnal dan Artikel

Anggraweni, Mutia; Ariany, Ria; dan Ameliza, Kiki, “Implementasi Penghapusan Piutang PBB-P2 yang Sudah Kadaluwarsa di Kota Bukittinggi”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, Juli 2022, hlm.256-268, <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.96>, di akses 12 Juli 2024, 10.58 WIB.

Ernanto Arisandi, “Asas Tunai dan Terang Dalam Jual Beli Tanah”, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 27 Mei 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15061/Asas-Tunai-dan-Terang-Dalam-Jual-Beli-Tanah.html>, diakses pada 25 Maret 2024 pukul 12.56 WIB.

Fitri Halimah, Mega dan Suryanto, “Perencanaan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung”, Al-Kharaj, Volume 6, Nomor 5, 2024, hlm.4715-4729, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/2124>, diakses 11 Juli 2024, 20.21 WIB.

Nadya Afifah, Lisa, “Perlindungan Hukum Wajib pajak Terkait Ketentuan *Official Assessment-System* Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan”, Jurist-Diction, Volume 5, Nomor 2, Maret 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/34896/17503>, hlm. 589-622, diakses 17 April 2024, 18.41 WIB.

Marhel, Jolanda, “Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, Nomor 3, Juli 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14972/12661>, hlm.249-256, diakses 16 April 2024, 17.45 WIB.

Nur Husnia, Fitria; Hidayat, Kadarisman; dan Yudhi Dewantara, Rizki, “Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-Pbb) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan), Jurnal Perpajakan (JEJAK), Volume 9, Nomor 1, Juni 2016, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=626440&val=6470&title=ANALISIS%20PENERAPAN%20ELEKTRONIK%20PAJAK%20BUMI%20DAN%20BANGUNAN%20E-PBB%20STUDI%20PADA%20DINAS%20PENDAPATAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20LAMONGAN>, hlm. 1-9, diakses 9 Juli 2024, 17.26 WIB.

Nuridin dan Wildan, Muhammad, “Pendaftaran Hak Atas Tanah karena Jual Beli”, DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2 (November 2020), hlm.192-201, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2805324&val=6094&title=Pelaksanaan%20Pendaftaran%20Peralihan%20Hak%20Atas%20Tanah%20Karena%20Jual%20Beli>, diakses 28 Maret 2024, 09.48WIB.

Purmidi, “Mengenal PBB-P2 dan PBB-P3”, Badan Pendapatan Daerah Indragiri Hulu, <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/207> , diterbitkan 27 Juli 2015, diakses 25 Maret 2024, 11.24WIB.

Ramadhani, Rahmat, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah”, Iuris Studia, Volume 3, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 15-50 , <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/212/198>, , diakses 01 April 2024 , 14.02 WIB.

Samosir, Hotmian Helena, “Perlakuan Perpajakan Atas Utang Pajak Yang Telah Daluwarsa Sehubungan Dengan Restitusi Pajak”, Jurnal BPPK, Volume 1, Nomor 1, November 2018, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/296/136/>, diakses 24 Juni 2024, 10.54 WIB.

Widyastuty, Yuniar ; Sarwani dan Rosari, Novika, “Mengungkap realitas penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu”, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm.234-245, <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3874>, diakses 11 Juli 2024, 19.24 WIB.

## Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa>, diakses 21 Juni 2024, 19.12 WIB

<https://kab-bantul.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses 17 Juli 2024, 19.21 WIB

<https://bpkpad.bantulkab.go.id/publication/pelaporan/catatan-atas-laporan-keuangan-calk/catatan-atas-laporan-keuangan-calk-per-tahun-anggaran>, diakses pada 19 Agustus 2024, 13.22WIB.